Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945

High School Students' Understanding of Human Rights According to the 1945 Constitution

Hodriani Sitompul*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan, Indonesia

*corresponding author: email: hodrianippkn@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4: "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, karena pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Tempat berlangsungnya pendidikan adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka perlu kerjasama antara tiga lingkungan ini untuk mencapai pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan untuk mengemban tugas dan mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan. Sekolah merupakan suatu institut yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sekolah mempunyai tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Pemahaman Siswa, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Education is one of the factors that aims to educate the nation's life as stated in the preamble of the 1945 Constitution paragraph 4: "To educate the life of the nation and to carry out the world order based on the freedom of perpetual peace and social justice ...". This means that every citizen is entitled to an opportunity to promote lifelong education, as education is conducted democratically and justice and leads to high human rights, religious values, cultural values and national pluralism. The venue for education is the family, school, and community environment. It is necessary to collaborate between these three environments to achieve education. School is a formal educational institution established to carry out the task and realize the aspirations of national, national ideals and educational goals. School is an institute that is needed by society and for society. School has the task of preparing students to become members or citizens in accordance with the ideals, expectations and values adopted and upheld in the community.

Keywords: Student Understanding, Human Rights, 1945 Constitution

How to Cite: Sitompul, H., (2017), Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (2): 158-175.

PENDAHULUAN

Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1: "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan". Ayat 2 menegaskan bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Maksudnya bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah, mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi serta mendapatkan pengajaran yang baik dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, yang diatur dalam undang-undang.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional bagi Bangsa Indonesia terdapat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 (Pasal 3):

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sekolah merupakan suatu institut yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti bagi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sekolah mengemban tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan, dan nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.

Gerakan Reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokratis, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan di antaranya pembaharuan kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi otak anak didik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang belum mereka ketahui tetapi mendidik seluruh aspek dirinya, jasmani maupun rohani.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini dibuat oleh guru di setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan mesin utama pendidikan yakni pembelajaran. Kurikulum 1994 yang ditetapkan melalui keputusan

MENDIKBUD No. 006/UU/1993 diimplementasikan, Pemerintah memandang perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan sesuai dengan antisipasi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global.

Oleh karena itu sejak tahun 2001, DEPDIKNAS melakukan serangkaian kegiatan untuk menyempurnakan kurikulum 1994 dan melakukan rintisan secara terbatas untuk validasi dan mendapat masukan empiris dan kurikulum, hal ini disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi karena pendekatan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkatan kelas pada akhir satuan pendidikan dirumuskan secara eksplisit, di samping rumusan kompetensi pula terdapat materi standar untuk mendukung pencapaian kompetensi dan indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat ketercapaian hasil pembelajaran.

Pada kenyataannya, penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar Sistem Pendidikan Nasional selalu relevan dan komperatif, seperti pada saat ini yang dipakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh guru di setiap Satuan Pendidikan untuk menggerakkan mesin utama pendidikan potensi sekolah, karakteristik sekolah, sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah karena sebahagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implematisasi Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah atau daerah. Sekolah harus menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari

Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan, struktur dan muatan KTSP, Kalender Pendidikan, Silabus dengan cara melakukan penjabaran dan penyesuaian standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dengan KEPMENDIKNAS No. 23 tahun 2006.

Sumber daya manusia bukan hanya ditinjau dari segi kecerdasan (intelektual) dan kerampilan saja, tetapi di samping kebangsaan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab kepada Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengecilkan arti dari bidang studi yang lain. Yang paling dekat untuk mencapai sasaran tersebut adalah pembelajaran pendidikan Kewarganegaran, sehingga sebenarnya Pendidikan Kewarganegaran itu harus memberikan warna tersendiri kepada bidang studi yang lain.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan kejahatan besar dan harus dijatuhi hukuman yang sangat berat sesuai dengan perkembangan budaya manusia pada anak dibawah umur.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 pasal 58 mengatakan:

Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Jadi setiap anak mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya.

PEMBAHASAN

Pemahaman tentang konsep Hak Asasi Manusia ini akan dibahas tentang kemampuan individu sebagai subyek hukum maupun sebagai warganegara dalam memahami, mensikapi, dan menerapkan hukum yang berlaku (hukum positif). Bentuk konkrit yang diharapkan adalah kemampuan seseorang menghormati hukum yang berlaku, menghormati hak orang lain, menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hidup secara kekeluargaan ataupun melalui jalur hukum. Kemampuan ini akan mengkondisikan seseorang menjadi manusia yang disiplin, mematuhi aturan yang berlaku, yang selalu berusaha menghindari konflik horisontal maupun vertikal, serta menolak perilaku premanisme dan anarki dalam penyelesaian berbagai masalah.

Pemahaman yang baik mengenai hak tersebut di atas akan bermanfaat bagi siswa dalam ikut serta menciptakan ketertiban dan keamanan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu definisi dasar tentang hak secara definitif. "Hak" merupakan untuk normatif yang berfungsi sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1996:671), disebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk

berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Unsur-unsur hak, yakni: a. Pemilik hak, b. Ruang lingkup penerapan hak, dan c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Pengertian hukum dan HAM di lapangan hukum itu sangat luas sekali, karena mengatur berbagai macam perhubungan kemasyarakatan. Hal ini yang menyebabkan hukum tidak dapat dikemukakan satu definisi yang singkat yang meliputi segala-galanya. Pengertian HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan pengertian HAM adalah: "Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian tersebut maka didalam HAM terkandung dua makna, yaitu : Pertama HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Menurut deklarasi PBB ada beberapa kategori HAM, yaitu hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiaannya, seperti pengakuan atas martabat, perlindungan dari tindak diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup, terbebas dari perbudakan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan yang adil, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak diintervensi kehidupan pribadinya, hak sipil dan hak politik, yaitu hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan, seperti kebebasan berfikir dan beragama dan hak berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan.

Gagasan tentang HAM telah muncul sebagai gagasan yang membanjiri diskursus politik di nusantara sejak abad 18. Hal ini mungkin bisa menjelaskan mengapa dalam

konstitusi negara, UUD 1945 dan UUDS, masalah hak asasi menjadi bagian dari pembahasan penting. Dalam UUD 1945 sampai pada amandemennya tetap mengakomodir HAM. Hal ini terlihat dalam ketentuan BAB XA Pasal 28A sampai dengan 28J. Bahkan hal itu sudah dikembangkan lagi melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mengenai Pengadilan HAM yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000, diberi tugas dan wewenang khusus untuk memeriksa serta memutuskan perkara pelanggaran HAM yang masuk kategori berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi (1) Kejahatan genosida (pembunuhan masal), merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan, meliputi salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Pelanggaran HAM yang tidak termasuk kategori tersebut diatas termasuk pelanggaran HAM biasa tidak diadili oleh Pengadilan HAM melainkan oleh Pengadilan Negeri. Pentingnya hukum dan HAM dalam ketertibana dan keamanan, arti pentingnya hukum dalam ketertiban dan keamanan terlihat dari diperlukannya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia didalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sejak masa

kecilnya manusia merasakan adanya peraturan hidup yang membatasi seapak terjangnya. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikelanya, kemudian juga berlaku diluarnya, yaitu dalam masyarakat. Yang dirasakan paling nyata ialah peraturana hidup yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut James W. Nicle dalam (Azra 2000: 199) mengatakan, "Secara *defenitif* hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi".

Menurut John Locke dalam (Azra 2000: 200) menyatakan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak yang kodrati, oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya, hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia".

Berdasarkan pada uraian di atas peneliti menarik kesimpulan secara sederhana bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak Dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat dan Negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan HAM ialah menjaga keselamatan manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan

kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan umum.

Azra (2000: 2001) mengatakan ciri-ciri pokok hak asasi manusia adalah: 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal usul sosial dan bangsa. 3) HAM tidak bisa dilanggar hak orang lain. Orang lain tetap mempunyai hak walaupun sebuah Negara memuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia dibutuhkan sarana dan prasarana. Menurut Hidayatullah (2002: 218), sarana dan prasarana di dalam hak asasi manusia dikategorikan menjadi 2 hal yaitu: 1) Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. 2) Sarana yang berbentuk peraturan perundang-undangan seperti adanya beberapa pasal dalam konsitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM terdapat dalam manusia sejak ia dilahirkan, karena itu Hak Asasi Manusia harus dihormati sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, hal tersebut diatur dalam KUHP. Jika ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan kejahatan besar maka harus dijatuhi hukuman yang sangat berat.

HAM perlu dijelaskan kepada anak, agar anak memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai

dengan UUD 1945. Di sekolah anak juga dapat menerima mata pelajaran yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diberikannya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku. Tujuannya agar anak memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945.

Dengan demikian siswa dapat meletakkan dasar-dasar kepribadian dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan secara khusus dapat mengembangkan, melestarikan, mengamalkan, memahami serta membina siswa yang sadar akan hak dan kewajiban juga taat terhadap peraturan yang berlaku.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun antar warga negara sendiri dan tidak sedikitnya yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pengusiran dan juga pembakaran tempat

tinggal. Selain itu juga ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan juga pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya sampai menghilangkan nyawa.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mau dan mampu menghormati hak asasi orang lain, serta mau dan mampu menegakkan hak asasi kita sendiri. Tidak sepatutnya kita berdiam diri terhadap perilaku pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.

Mengenai hak asasi manusia di negara Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 yang dinyatakan dengan tegas, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hal ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia sejak pertama kali memproklamasikan kemerdekaan telah memperhatikan hakikat hak asasi manusia. Oleh karena itu, kesadaran terhadap hak asasi manusia pada setiap warga negara Indonesia harus ditingkatkan terlebih lagi bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dibutuhkan suatu alat yang dapat menerapkan kesadaran hak asasi manusia pada setiap warga negara.

Pendidikan adalah salah satu alat untuk membangun bangsa Indonesia melalui generasi mudanya. Karena pendidikan memberikan arti penting dalam masa perkembangan generasi muda, khususnya dalam perkembangan sikap dan

perilaku guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya. Pendidikan memiliki hakikat mengajarkan manusia untuk menjunjung etika, moral, akhlak, budi pekerti serta perilaku manusia yang dapat menciptakan suatu kehidupan yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu alat dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Effendi (2005:36) yaitu : "Bentuk kejelasan pemerintah di dalam menegakkan HAM salah satunya dengan menyebarluaskan pemahaman HAM ke dalam dunia pendidikan, menjadi pedoman aparat/pejabat, para profesional, dan juga diketahui anggota masyarakat luas (grass root), antara lain kalangan buruh dan tani".

Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP/MTS yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2006, HAM merupakan salah satu aspek dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn yang meliputi Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat, Instrumen Nasional dan International HAM, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM.

Materi Hak Asasi Manusia dibelajarkan dalam PKn dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenyataan ini sesuai dengan misi dari mata pelajaran PKn, yaitu sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban

untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

Kesadaran akan hak asasi manusia memang diperlukan dan tidak hanya sekedar kampanye publik, tetapi memerlukan sistem penanaman nilai sejak dini yaitu melalui sistem pendidikan yang secara sengaja memasukkan materi Hak Asasi Manusia. Di sekolah banyak siswa yang melakukan perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti tidak menghargai pendapat teman, menghina guru, tidak hormat kepada orang tua, tidak menghargai hak asasi temannya, serta hanya menuntut haknya saja sebagai siswa tanpa melaksanakan kewajiban. Dengan demikian materi mengenai Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia sejak dini sebagai upaya dalam pembinaan warga negara yang baik yaitu warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya

Sedangkan tujuan dari PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya. 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Depdiknas, 2006:49)

Dengan tujuan PKn di atas, selayaknya pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan intelektual dan pengalaman. Oleh karena itu, ada yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mempersiapkan pembelajaran Hak Asasi Manusia di kelas, selain bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran, juga perlu memperhatikan berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial yang bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi guru harus mampu berperan sebagai inisiator, direktor, fasilitator, organisator, serta kompetensi-kompetensi yang lainnya yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru sehingga tujuan belajar dapat tercapai.

Oleh karena itu pembelajaran hak asasi manusia pada PKn perlu dibangun dan dikembangkan guna melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa yang memerlukan kesadaran hak asasi manusia dari setiap warga negaranya, sehingga tujuan dari pembelajaran hak asasi manusia tercapai yaitu terciptanya warga negara yang mau dan mampu untuk menjunjung tinggi hak asasinya.

Beberapa norma yang berlaku di masyarakat, yaitu (1) norma agama, (2) norma kesusilaan, (3) norma kesopanan, dan (4) norma hukum. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan bertujuan membina ketertiban kehidupan manusia, namun ketiga norma itu belum cukup memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Karena ketiga norma tersebut tidak mempunyai sangsi yang

tegas, jika salah satu dari peraturannya dilanggar.

Pelanggar norma agama diancam dengan hukuman dari Tuhan, dan hukuman itu berlaku kelak di akherat. Pelanggaran norma kesusilaan mengakibatkan perasaan cemas dan kesal hati bagi si pelanggar yang insyaf. Pelanggaran norma kesopanan mengakibatkan dicela atau diasingkan dari lingkungan masyarakat. Disamping itu masyarakat mengenal hal-hal yang tidak termasuk dalam lingkungan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Umumnya antara ketiga norma itu tidak ada satupun yang mewajibkan bahwa seorang buruh yang dipecat karena sering mabuk harus diberikan keterangan oleh majikannya, bahwa jalan diatur hanya satu arah. Banyak lagi hal-hal yang tidak diatur oleh ketiga norma tersebut, yang sebenarnya perlu juga diatur guna ketertiban dan keamanan dalam masyarakat seperti urusan Bank, Perseroan Terbatas, lalu lintas di jalan dan lain-lain.

Norma hukum adalah ditujukan kepada permainan kepentingan orang lain bukan penindas, mempengaruhi perbuatan manusia, ada paksaan dari luar. Selanjutnya dalam rangka ketertiban dan keamanan, Hak Asasi Manusia juga mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara (penguasa) dengan warga negara (rakyat), dan dalam hubungan antara sesama warga negara. HAM yang berisi hak-hak dasar manusia memuat standar normatif untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya dan hubungan rakyat dengan sesama rakyat. Oleh karena itu penegakan HAM mempunyai makna penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari

kesewenang-wenangan penguasa ataupun pihak lain. Penegakkan HAM mempunyai relevansi dengan Civil Society, karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri Civil Society. Dengan demikian penegakan HAM merupakan persyaratan untuk menciptakan sebuah Civil Society atau masyarakat madani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Pendidikan juga merupakan upaya manusia secara lebih manusiawi karena dengan pendidikan semua potensi seperti bakat, minat dan kemampuan manusia yang ditumbuh kembangkan secara optimal dapat mengesistensikan esensi kemanusiannya. Pendidikan merupakan proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Hal ini mengandung pengertian bahwa arti dan peranan pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah sama pentingnya, sebab kedua system pendidikan tersebut merupakan komponen yang menentukan dalam keseluruhan proses pendidikan manusia dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

System pendidikan terdiri dari komponen siswa, lingkungan, guru, fasilitas, dan program pendidikan. Semua hal tersebut di atas adalah sebagai komponen penentuan keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sebuah usaha yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya ataupun baik buruknya pendidikan selain orang tua adalah guru. Guru sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan karena ditangannya hal tersebut dapat diperoleh secara lebih bermutu. Karena pada puncak guru terdapat beban penentu keberhasilan pendidikan, maka sudah selayaknya didalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus dibekali oleh sejumlah kemampuan dasar (kompetensi), sehingga guru akan lebih profesional menjalankan misinya, baik secara kedudukannya sebagai pendidik, pengajar ataupun sebagai pembimbing. Untuk mencapai target misi dalam pembelajaran, baik yang sifatnya instruksional maupun tujuan pengiring akan dapat dicapai secara optimal apabila dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi yang menguntungkan bagi peserta didik. Dalam setiap proses pembelajaran kondisi ini harus direncanakan dan diusahakan oleh guru secara sengaja agar terhindar dari kondisi yang merugikan (usaha pencegahan), dan kembali kepada kondisi yang optimal apabila terjadi hal-hal yang merusak yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik di dalam kelas.

Manan dalam (Azra 2000: 214) membagi HAM pada beberapa kategori yaitu Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi, Hak Sosial dan budaya. Hak Sipil terdiri dari hak

diperlakukan sama dimuka hukum, Hak Bebas Dari Kekerasan, Hak Khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, Hak Hidup dan kehidupan, Hak Politik terdiri atas Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Hak Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hak ekonomi terdiri dari jaminan sosial, Hak Perlindungan Kerja, Hak Perdagangan dan Hak Pembangunan Berkelanjutan. Hak sosial budaya adalah Hak Memperoleh Pendidikan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kesehatan dan Hak Memperoleh Perumahan”.

Sri Sumantri dalam Marsudi (2003: 97) menggolongkan Hak Asasi Manusia menurut jenisnya sebagai berikut: 1) Hak Asasi Pribadi atau *personal rights* seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak. 2) Hak Asasi Manusia ekonomi atau *property rights* seperti hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. 3) Hak Asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang biasa disebut *rights of legal equality*. 4) Hak Asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti Hak Pilih dalam pemilihan umum, Hak Mendirikan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. 5) Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* seperti: Hak Untuk Mendapat Perlindungan dalam hal penangkapan, pengeledahan, penahanan dan peradilan. 6) Hak Asasi untuk membangun atau *rights to development* yaitu Hak Asasi bagi suatu Negara/komunitas untuk membangun

negaranya tanpa campur tangan Negara lain. 7) Hak Asasi Manusia untuk membangun atau *rights to development* yaitu Hak Asasi bagi suatu negara/komunitas untuk membangun negaranya tanpa campur tangan negara lain

Sementara di dalam UUD 1945 pasal 28A-28 J memuat Hak Asasi manusia yang terdiri dari hak: 1) Hak Kebebasan mengeluarkan pendapat, 2) Hak Kedudukan yang sama didalam hokum, 3) Hak Kebebasan Berkumpul, 4) Hak Kebebasan Beragama, 5) Hak Kebebasan yang Layak, 6) Hak Kebebasan Berserikat, 7) Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

Secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM sebagai Berikut: 1) Hak Hidup, 2) Hak Untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, 3) Hak Mengembangkan Diri, 4) Hak Memperoleh Keadilan, 5) Hak Kebebasan Pribadi, 6) Hak Atas Rasa Aman, 7) Hak Atas Kesejahteraan, 8) Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan , 9) Hak Wanita, 10) Hak Anak

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut terkristal dalam pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam butir-butir dari Sila-sila Pancasila yang mengandung unsur-unsur Hak Asasi Manusia secara umum. Hak Asasi Manusia bagi bangsa Indonesia selalu didasarkan kepada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang dilandaskan kepada persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional dan ketahanan nasional.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kita telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan telah mendahului Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Hak Asasi Manusia dalam pemahaman bangsa Indonesia, bukan dalam pandangan barat. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam negara yang berdasarkan pemahaman atas Hak-hak Asasi Manusia yang dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Derajat manusia adalah kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan hak-hak maupun Kewajiban-kewajiban Asasi. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan kejahatan besar dan harus dijatuhi hukuman yang sangat berat. Sesuai dengan perkembangan budaya manusia, manusia harus menghormati Hak Asasi Manusia seperti kita lihat banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada anak, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 56 mengatakan:

Bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, pelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Selanjutnya Kansil (2003: 16–21) mengemukakan bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung (memuat) hak-hak asasi manusia, di antaranya sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia menurut sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Sila ini menjamin kemerdekaan bagi setiap orang, dimana setiap orang bebas memilih dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berarti pengabdian Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Hak asasi Manusia Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya *Human values* dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *Human right* serta *human freedom*, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai manusia makhluk sosial. Sebagai individu ia mempunyai Hak-hak Asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankannya terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun individu lainnya. Sebagai makhluk sosial, penggunaan Hak Asasi orang lain bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Hak Asasi Manusia menurut persatuan Indonesia, persatuan Indonesia atau kebangsaan adalah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai dan lain-lain. Kesadaran bangsa lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati

Hak-hak Asasinya tanpa pembatas dan belenggu dari manapun datangnya. Kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan Hak Asasi Manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini, tidak ada suatu jaminan bahwa Hak Asasi Manusia mendapat perhitungan.

Hak Asasi Manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (kedaulatan rakyat). Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada ditangan rakyat. Negara dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia sedang pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala Hak-hak Asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat berwujud dalam bentuk Hak Asasi Manusia, seperti Hak Mengeluarkan Pendapat, Hak Berkumpul dan Rapat, Hak Ikut Dalam Pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan pers dan lain-lain.

Hak Asasi menurut sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat

Jatuhnya pemerintahan orde baru di Indonesia telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia, tuntutan agar dilakukannya peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia terus berlangsung maka terjadilah reformasi, dimana salah satu tuntutan dari reformasi adalah supremasi hukum dan penegakkan Hak Asasi Manusia. Namun kenyataannya,

masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia belum juga terselesaikan

Bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak saja dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat melainkan juga terjadi dalam hubungan sesama anggota masyarakat. Upaya pelaksanaan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan sejak bangsa Indonesia merada di bawah kekuasaan penjajah, di antaranya: 1) Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo yang merupakan tonggak kebangkitan bangsa Indonesia unuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah. 2) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa ini harus bersatu bangsa, tanah air dan bahasa agar dapat melepaskan diri dari penjajah. 3) Puncak perjuangan bangsa Indonesia yakni Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang diikuti dengan lahirnya UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945

Rumusan Hak Asasi Manusia secara nyata telah dicantumkan dalam Pasal-pasal UUD 1945, UUD RIS 1949, serta UUDS 1950.

Dalam kehidupan, Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Hak Pribadi (*Personal Rights*), yang terdiri dari Hak Hidup, kebebasan beragama, dan berkeluarga, b. Hak Politik (*Political Rights*), seperti Hak Berbicara, menyatakan pendapat, berorganisasi, dan menjadi anggota partai. c. Hak Dalam Hukum (*Legal Rights*), yaitu hak yang berkaitan apabila seseorang diduga melakukan tindakan hukum, diantaranya atas praduga tak bersalah, Hak Membela Diri, Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum, Hak Mendapatkan Keadilan dan Hak Cipta. d. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) seperti Hak

Milik, Hak Usaha, Hak Bekerja, Hak Hidup Layak, serta mengadakan kontrak kerja (kerja atau sewa menyewa. e. Hak Sosial Budaya (*Social and Cultural Rights*), seperti Hak Mendapatkan Pendidikan dan Hak Untuk Menikmati Cinta Rasa Seni, mode, serta melaksanakan program keluarga berencana.

Bagi Bangsa Indonesia, Hak Asasi merupakan Hak Dasar seluruh umat manusia tanpa adanya pembedaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan dengan harkat serta martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati Hak Asasinya tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial dan bahasa serta status lain. Bangsa Indonesia menyadari bahwa Hak Asasi Manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan kejahatan besar yang harus dijatuhi hukuman yang sangat berat. Sesuai dengan perkembangan budaya manusia, manusia wajib menghormati Hak Asasi Manusia. Hak yang paling asasi bagi setiap manusia adalah Hak Hidup. Hak tersebut sekaligus melahirkan kewajiban untuk menghormati Hak Hidup orang lain, itulah yang disebut dengan Kewajiban Hak Asasi Manusia.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Jika kita menggunakan sesuatu sebagai hak kita, tidak boleh lupa bahwa kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Jika kita mengabaikan hal ini, suasana

kehidupan sosial yang dilalui akan menjadi tidak nyaman dan tidak wajar, sebagai contoh kemacetan lalu lintas di jalan raya adalah bentuk tidak serasinya pelaksanaan hak asasi manusia dari pengguna jalan raya. Akibat yang mungkin timbul dari situasi ini adalah percekcoan yang menimbulkan kesalahpahaman dan sering diakhiri dengan perkelahian. Dengan kata lain, berhenti di tempat terlarang bagi kendaraan beroda empat juga merupakan pelanggaran Hak Asasi bagi orang lain.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Ada dugaan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di berbagai tempat yang sering sekali cenderung berupa tindakan yang bersifat seperti pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, yang menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat.

Kondisi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas mempunyai dampak yang sangat luas baik Nasional maupun Internasional, antara lain mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, akibat banyaknya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yang perlu segera diatasi.

Tuntutan Reformasi, bagi yang sangat mengganggu jalannya pemerintahan harus segera diatasi dan diciptakan suasana yang kondusif, berupa ketertiban, keamanan dan ketentraman harus memperhatikan prinsip-

prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Bangsa-bangsa yang beradab.

Lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk untuk melindungi manusia dalam kedudukannya sebagai individu, anggota masyarakat atau warga negara dari pelanggaran atas hak-haknya. Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia tersebut bisa dilakukan oleh individu, kelompok orang atau lembaga negara sekalipun, yang bertindak dengan tidak memindahkan hak-hak orang lain.

Lembaga yang melindungi Hak Asasi Manusia antara lain: a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), b) Komnas HAM dibentuk dengan pertimbangan bahwa sesungguhnya manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dianugerahi Hak-hak Asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi. c) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum seperti Lembaga Badan Hukum (LBH) yang dibentuk para *advocat* merupakan bantuan yang diberikan pada masyarakat yang bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, keturunan, ras, agama, ideologi, keyakinan, politik, hak milik. D) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum

Pada beberapa kota besar dibentuk biro konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang dianggap perlu serta membutuhkan hukum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah banyak terjadi di Indonesia. Banyak pelanggaran HAM yang bersifat ringan maupun kekerasan terhadap Perempuan. Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia baik berupa tindakan kekerasan maupun

ketidakadilan gender, sering terjadi dan dialami kaum perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yakni : a) Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. b) Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terutama perempuan dan peraturan perundangan yang berlaku menyampaikan berbagai saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. c) Pemantauan dan penelitian termasuk pencarian fakta tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pada masyarakat. Pelaksanaan kerja sama regional dan Internasional dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Tantangan penegakan HAM di Indonesia untuk masa- masa yang akan datang telah digagas oleh Pemerintah Indonesia, salah satu lembaga yang dibentuk untuk menangani persoalan tersebut, adalah Komisi Nasional Indonesia.

SIMPULAN

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir dan agar dapat meningkatkan kemampuan

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan rekonstruksi pengetahuan sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana yang dipakai pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dan mengenai kebijakan yang dapat menjadi pengetahuan peserta didik sehingga mempunyai kesadaran untuk membangun negara dan bangsa Indonesia.

Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu didesentralisasikan terutama dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah atau daerah. Dengan demikian, sekolah atau daerah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Di sekolah anak dapat menerima mata pelajaran yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diberikannya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku. Tujuannya agar anak memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian siswa dapat meletakkan dasar-dasar kepribadian oleh nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan secara khusus dapat mengembangkan, melestarikan, mengamalkan, memahami serta membina siswa yang sadar akan hak dan kewajiban juga taat terhadap peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap Hak

Asasi Manusia merupakan kejahatan besar dan harus dijatuhi hukuman yang sangat berat. Manusia wajib menghormati Hak Asasi Manusia pada anak, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Pembelajaran HAM mempengaruhi pemahaman siswa terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan materi bagaimana sebenarnya sikap seseorang maupun siswa di dalam lingkungan sekolah. Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk memberikan perilaku yang baik, sebab apabila siswa melihat seorang guru bersikap tidak baik, maka siswa itu juga akan mengikuti sikap tersebut dan sebaliknya guru yang berperilaku baik akan memberikan dampak positif bagi siswa-siswi di sekolah tersebut. Karena apabila seorang guru atau pendidik tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didik, maka cenderung anak didik tersebut, tidak dapat melakukan suatu tindakan yang baik.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak atau kewenangan yang melekat pada diri individu sejak ia lahir secara kodrati yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya. HAM ada selama adanya manusia, sejak dahulu sampai sekarang. HAM tidak dapat berubah kedudukannya. Kedaulatan suatu negara akan berwujud dan bermartabat apabila terdapat penghargaan yang berartiterhadap HAM dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya.

HAM ada seiring dengan sejarah perkembangan manusia dan peradabannya. Adapaun pernyataan legalitas HAM diyakini dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*, *Bill of Right*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika,

Deklarasi Perancis, samapai dengan Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 1999. *Penelitian Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Angelia, N., (2017). Pemahaman Penanaman Empat Pilar Kebangsaan terhadap Siswa SMA Negeri 4 Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5 (1): 15-20.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakar Rineka.
- Bisri, I., 2007, *System Hukum Indonesia, Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dharma, S. dan Rosnah Siregar (2014). Internalisasi Karakter melalui Model Project Citizen pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6 (2): 132-137
- _____. (2015). Membangun Pengalaman Belajar Kewarganegaraan melalui Model Pembelajaran Project citizen pada Siswa, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7 (1) (2015): 100-106.
- Departemen Pendidikan Nasional 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*: Jakarta, Balai Pustaka
- El-Muhtaj, M., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- FIS Unimed. 2006. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan
- Gaol, R.L (2015). Meningkatkan Kreativitas Siswa pada Nilai-Nilai Demokrasi dan Hak Azasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 7 (1) (2015): 76-82.
- Irsan, K., 2007, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kansil, CTS. 2004. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Kleden, M., 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, Lamera, Jakarta
- Luhulima, A. S. dan Kunthi T, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, H. 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung..
- Munthe, Riswan. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7 (2) (2015): 184-192.
- Nasution, A.R., (2016), Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (2) (2016): 201-212
- Nawa, H 1990 *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Bandung: CV Ami
- Nurheny, H., 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter, S. 1986, *The Contemporary English – Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern Englis Press.
- Priyanto, D, 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarumpaet, B.A.M., dan Nurhairani, (2017). Mahasiswa dan Peradaban Pemikiran. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 5 (2): 79-84
- Sembiring, M. 2009. *Pendidikan Pancasila Dan UUD 1945*, Medan.
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 61-72.
- _____. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 61-72.
- Soekanto, S. 1990, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 192-203
- _____. (2017), Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534

- Tarigan, L. 2006. *Pendidikan Nilai Dan Moral*. Medan.
UU RI No.20 Tahun 2003. *Tentang Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokus Media.
- Wahyudi, A., (2017). Membangun Generasi Cerdas Berhukum. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 5 (2): 116-125
- Winarno, S. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Dasar Metodologi*. Bandung: Tarsito.